EKSISTENSI POLA HIDUP DAN BUDAYA MASYARAKAT BANTEN DI TENGAH ERA GLOBALISASI

Nurhadi
Akademi Sekretaris dan Manajemen BSI Jakarta
Jl. Kamal Raya No.18,RingRoad Barat,Cengkareng, Jakarta Barat
Email : nurhadi_BSI@yahoo.com

ABSTRACT
After a major disaster occurs the Krakatau volcanic upheaval of cultural fusion between the region into a funnel changing mores of civilization, more rapid global flows in all areas of culture will be eroded by the advance of civilization itself towering hills with thatched safananya rice fields with a broad expanse of banana trees , coconut, a bamboo is so remedy, settlement houses and a bamboo thatched roof rumbiya disappear without leaving a trace, every month held a prayer every mosque now only the name of the clergy and congregation qodiriyah Naqsyabandiyah eroded one by one change in the era of take-off time has eroded the generation shift factor present into memories of changing times. the climate became hot jelagat erratic jet black skin, the water becomes a channel of the rulers arbitrarily killing people en masse to be poor structural delicious he sat on a wet field will not be afraid to rebel again each other.The series shows the beauty of the beach like knick knacks and glittering diamonds sparkle metropolotan beauty of the city but does not belong to the citizens in general offerings solely unused money to the top, the challenge facing him like an enemy to challenge an invincible warrior who never theKrakatau child .The Banten in his second term it after the Nangro Aceh Darusalam uphold the teachings of the classics that brought its predecessor. Will the public offerings will change the mindset whereas the domicili to the Banten diaspora groups to host a guest while the native land of his own, offerings a priority progress of civilization up to the hindia empire until kerepublik dutch. Leadership is only for lobbying and protection of investors rather than native sefty number one is not prioritized, as a result of race kehegominition the Pandeglang neglected citizens become less marginalized citizens the Rangkas bitung (lebak) looking structural poverty, the Tangerang contaminated with various interests of the feudalistic. Could it be according to classic predecessors mitolgi theSundanese traditional ancestor witwitan assume that the embryo of marginalized indigenous people will immigrate to the Ujungkulon while they has become a national park ownership is recognized by all countries to donors on they towards sustainability.

Keywords**: **Way Of Life**, **Culture, Globalization

I. PENDAHULUAN

Kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, dan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya, yang biasanya tidak lepas dari ikatan-ikatan. Proses pembangunan dampak positif dan negatif berupa terjadinya perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya sehingga dengan sendirinya mental manusiapun terkena pengaruhnya. Akibat lebih jauh dari pembenturan nilai budaya ini akan timbul konflik dalam kehidupan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dalam teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dengan tata nilai budayanya, sehingga manusia bingung sendiri terhadap kemajuan yang telah diciptakannya. Hal ini merupakan akibat sifat ambivalen teknologi, yang disamping memiliki segi-segi positifnya, juga memiliki segi negatif akibat dampak negatif teknologi, manusia kini menjadi resah dan gelisah.

A. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

B. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan.

Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

C. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses *industrialisasi* yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya.

Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri.

Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Pada tengah masyarakat.

Menurut Gibson, Ivancevich, Donnely (1996) membagi konflik atas:

1. Konflik yang Fungsional yaitu pertentangan antara kelompok untuk mempertinggi atau menguntungkan organisasi.
2. Konflik yang tidak fungsional yaitu setiap pertentangan atau interaksi antara kelompok yang menganggu oragnisasi atau upaya pencapaian tujuan organisasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Menyimak Kehidupan Remaja Dalam Perspektif Hubungan Minoritas dan Mayoritas di Indonesia

Berbicara tentang kehidupan seorang minoritas pada kenyataan tidak hanya terbatas pada mereka yang berasal dari kelompok yang secara umum dianggap minoritas, seperti kelompok etnis China, tetapi juga mencakup mereka yang dalam konteks sosial tertentu menjadi kelompok minoritas, seperti wanita dalam birokrasi pemerintahan, atau muslim diantara orang-orang non muslim,orang kristen birokrasi pemerintahan, atau muslim diantara orang-orang non muslim, orang kristen diantara orang-orang non kristen, dan seterusnya. Dan tidak selamanya seseorang itu menjadi minoritas, karena ia bisa menjadi minoritas dalam satu konteks sosial tertentu, tetapi ia

juga bisa menjadi mayoritas dalam konteks sosial yang lain.

Selain itu, kehidupan seorang termasuk dalam kelompok minoritas tidak selalu buruk, karena dalam hubungan kekuasaan tertentu, seseorang minoritas bisa saja menjadi pimpinan yang dihormati. Dengan kata lain, posisi seseorang sebagai monoritas amat ditentukan oleh hubungan kekuasaan antara yang bersangkutan dengan yang lainnya. Hubugan kekuasaan yang dimaksud disini bukan hanya hubungan birokrasi yang secara struktural memang bersifat *hirarkis* dan *superior*. Dalam kehidupan keseharian, kita bisa menemukan banyak sekali hubungan kekuasaan, atas dasar umur, pendidikan, kekyaan atau akses ke sumber-sumber ekonomi, atau akibat sejumlah hubungan asimetris di masa lalu.

Dengan mempertimbangkan kenyataan diatas, maka tidak mudah bagi penulis-sebagai seorang peneliti- untuk mengemukkan perjalanan hidup seorang minoritas sebagai suatu cerita pribadi yang penuh dengan tekanan atau kekerasan. Oleh karena itu penulis memilih untuk mendiskusikan beberapa isu penting dalam hubungan minoritas dan mayoritas di Indonesia. Namun, ini tidak berarti bahwa penulis menganggap cerita pribadi tersebut tidak penting untuk dibicarakan. Barangkali setelah mengemukan beberpa isu penting dalam hubungan minoritas dan mayoritas kita bisa secara umum dan ringkas membicarakan masalah diskriminasi terhadap kelompok-kelopmok minoritas.

B. Isu Hubungan Mayoritas-Minoritas

Paling tidak ada empat hal yang sangat penting untuk memahami hubungan mayoritas dan minoritas secara komprehensif, yang dapat dikemukakan disini :

1. Bahwa pengertian dari minoritas (dan mayoritas) itu sendiri sangat problematik. Minoritas cenderung diartikan sebagai sedikit atau kecil dalam jumlah, sehingga mempunyai posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang berjumlah lebih banyak. Begitu juga dengan minoritas, ia cenderung diartikan sebagai berjumlah lebih banyak sehingga lebih bergantung dari mereka yang berjumlah sedikit. Tetapi, seperti telah dikemukakan sebelumnya, bisa saja mereka berjumlah lebih sedikit menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga posisi mereka lebih menguntungkan dari pada kelompok mayoritas, apa bila kita melihat hubungan antara kelompok etnis China dan kelompok etnis Indonesia yang sering kali disebut asli atau pribumi, kita bisa melihat bagaimana ketika pengertian tentang jumlah yag kecil untuk minoritas ditetapkan pada satu sisi, maka persoalan dominasi sekelompok kecil etnis China dalam bidang ekonomi disisi yang lain menjadi sesuatu yang kontradiktif sekali. Dibanyak tempat di Indonesia kedaan yang kontadiktif seperti ini juga bisa ditemukan dalam hubungan tidak setara diantara kelompok etnis lokal dan kelompok etnis pendatang yag dari segi jumlah sebenarnya jauh lebih sedikit. Istilah BBM atau bugis buton makasar yang terkenal dibeberapa tempat di Indonesia bagian timur sesungguhnya mencerminkan hal lain. Begitu juga dengan persoalan lain transmigran jawa. Barangkali saja yang berbeda dengan kelompok etnis cina adalah bahwa kelompok-kelompok tersebut (bugis,buton,makasar, jawa, sunda,) tidak pernah secara historis diberi label "kelompok minoritas". Menurut Rais (2002;46) membatasi bahwa "kelompok diaspora adalah kelompok yang berasal dari satu kebudayaan tertentu tetapi telah berkembang menjadi banyak kelompok yang menyebar beradaptasi dengan kebudayaan dan lingkungan lokal dimana mereka tinggal, sehingga dari sudut pandang ini –dari sudut pandang budaya sinkretis–kelompok-kelompok ini menjadi berbeda satu sama lain".
Dalam sejarah dunia ada dua kelompok yang selalu dibahas sebagai sebuah kelompok minoritas yaitu kelompok etnis China dan etnis kelompok yahudi, karena keduanya merupaka kelompok *diaspora* yang menyebar keberbagai tempat didunia. Jadi kelompok minoritas disini sesungguhnya adalah apabila dipandang dari sudut kelompok-kelompok *diaspora* tersebut, bukan dari kelompok kebudayaan asalnya. Sebenarnya dalam konteks nasional Indonesia yang kecil, beberapa kelompok etnis asli juga telah terjadi kelompok *diaspora* dalam pengertian yang sama. Seperti misalnya kelompok etnis jawa, kita kenal istilah orang jaton atau jawa tondano, orang jawa-sunda,orang jawa-kalimantan. Begitu juga orang bugis dan

orang minang yang tersebar dibanyak tempat ditanah air.

2. Hubungan antara minoritas dan mayoritas bervariasi dalam berbagai konteks sosial, baik yang menyangkut lokasi atau tempat (urban rural, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, tempat kerja lingkungan, tempat tinggal, dan seterusnya) maupun waktu (masalalu, masa kini maupun masa depan). Kontek ruang dan waktu sering kali diabaykan pada waktu kita membicarakan hubungan minoritas dan mayoritas sehingga yang terjadi adalah "pengensialisasian" pengeminoritasan /kemayoritasan kelompok tertentu untuk setiap ruang dalam waktu yang berbeda, sehingga keminoritasan/kemayoritasan tersebut menjadi langgeng dimana pun dan kapan pun. Hal ini bisa berarti positif maupun negatif tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Apa bila kita mengambil kasus kelompok etnis cina yang dilihat sebagai kelompok minoritas diIndonesia, misalnya maka tampak bahwa keminoritasan yang ditempelkan pada kelompok ini pada masa orde baru mempunyai dampak negatif bagi yag bersangkutan, kalena kelompok ini cenderung menjad marjinal dalam berbagai hal, seperti politik, kebudayaan (termasuk pendidikan),dan keamanan. Bahwa keminoritasan itu sekarang- dalam era reformasi ini – menjadi positif apa bila dilihat dari sudut kemunculan gerakan anti diskriminasi adalah suatu hal yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan lagi, tetapi untuk sementara barangkali bisa kita terima sebagai suatu asumsi sementara. Dengan cara ini kemayoritasan pun bisa dilihat sebagai sesuatu yang *problematik*, sebagaimana keminoritasan diatas. Kalau kita ambil contol kelompok etnis jawa misalnya jelas bahwa kemayoritasan mereka dimasa orde baru menjadi suatu yang positif, paling tidak membantu keberhasilan seseorang dari kelompok etnis ini untuk melakukan mobilitas sosial vertikal pada birokrasi pemerintahan melalu jaringan atau kejawaan. Tetapi sekarang, kemayoritasan itu dipermasalahkan oleh kebayakan kelompok etnis minoritas, khususnya diluar jawa, yang selama pemerintahan orde baru merasa dimarjinalisasikan oleh kelompok etnis jawa melalui hubungan kekuasaan dalam birokrasi dan dalam akses kepada sumber-sumber ekonomi.
3. Hubungan minoritas dan mayoritas tidak hanya mencakup hubungan etnisitas atau hubunga keagamaan, melainkan juga hubungan sosial ekonomi yang menyangkut kelas atau status sosial, hubungan politik dalam partai dan demokrasi pemerintahan, serta hubungan budaya yang berkaitan dengan ekspresi seni dan identitas kelompok-kelompok kebudayaan yag berbeda. Persoalan ini penting untuk diperhatikan apa bila kita mencoba melihat permasalahan dalam hubungan minoritas dan mayoritas secara proposional, baik dalam hal kelompok etnis China maupun kelompok etnis Indonesia lainnya. Seperti saya kemukakan sebelumnya, seseorang bisa saja menjadi minoritas dalam konteks tertentu, tetapi juga bisa jadi mayoritas dalam konteks yang lain hal ini tercermin dalam kehidupan keseharian kita dijakarta. Misalnya ketika seorang etnis pribuni pergi kepasar glodok, ia akan merasa sebagai minoritas, walaupun ketika ia berada di daerah rawamangun, ia akan merasa sebagai bagian dari kelompok mayoritas. Disisilain, sebagai seorag etnis pribumi dari status sosial ekonomi yang cukup tinggi, walaupun dia didaerah glodok ia merasa menjadi mayoritas ketika ia berkumpul dengan orang-orang dari status sosial –ekonomi yang cukup tinggi, walaupu didaerah glodok ia merasa menjadi monoritas dari segi keetnisan, akan tetapi ia merasa menjadi minoritas didaerah rawamangun ketika ia berkumpul dengan orang-orang asal pribumi dari status sosial –ekonomi yang lebih rendah. Apa bila yang bersangkutan seorang wanita, maka ia akan merasa menjadi minoritas lagi diantara pria-pria etnis cina. Apabila ia juga beragama hindu, maka ia merasa tiga kali menjadi minoritas diantara para pria etnis China yang beragama kristen, dan seterusnya. Hal ini sama juga bisa terjadi dengan seorang etnis China yang berada ditengah-tengah kelompok etnis pribumi. Namun perlu dicatat bahwa keminoritasan tersebut tidak selalu muncul secara spontan karena beberapa perbedaan itu secara biologis atau dari ciri-ciri phisik tidak tampak, tidak seperti perbedaan ras yang mencakup perbedaan warna kulit, atau perbedaan gender yang secara fisik juga terlihat dengan jelas.

Terkecuali isu yang berkaitan tersebut dikemukakan oleh seseorang secara sengaja, maka iu agama,misalnya tidak akan langsung menjadi kriteria bagi penggolongan seseorang kedalam suatu kelompok (agama) minoritas.

4. Hubungan minoritas-mayoritas dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah menjadi bermasalah karena keberpihakan pemerintah terhadap salah satu kelompok dalam banyak konteks secara konsisten atau pun tidak konsisten berdampak negatif pada, atau merugikan pihak lainnya. Ini yang sering kali dipersoalka dalam hubungan antara kelompok etnis China dan kelompok etnis yang disebut asli atau pribumu bahwa kebijakan ekonomi pemerintah orde baru lebih memihak kelompok etnis China oleh karena itu pada masa pemerintahan Soeharto banyak bermunculan konglomerat China yag memegang hak monopoli disektor-sektor ekonomi tertentu. Begitu juga dengan kebijakan tranmigrasi yang kita dengan lebih menguntungkan para pendatang dari paa penduduk lokal di sumatera, kalimantan dan sebagainya. Atau dengan kebijakan investasi yang dianggap lebih menguntungkan perusahaan asing dari pada penduduk sekitar terutama karena dampak lingkungan yang di tinggalkan. Semua ini berkaitan erat dengan persoalan yang kita sebut sebagai hubungan minoritas-mayoritas.

C. Diskriminasi

Persoalan yang dihadapi individu-individu dalam konteks hubungan minoritas-mayoritas seperti yang telah dikemukakan diatas, tidak selalu sama. Akan tetapi, persoalan diskriminasi atau pun tekanan yang diterima oleh seseorang minoritas dalam hubungan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok mayoritas buka suatu persoalan yang harus dikesampingkan sebagai sesuatu yang tidak berarti atau pun diperbesar sehingga menjadi tidak proporsional lagi. Misalnya masalah hambatan yang dipunyai perempuan muslim dalam berkarir seperti yang dilihat oleh panitia memang perlu menjadi perhatian kita semua.

Namun, pembicaraan kita tentang institusi yang melindungi hak-hak perempuan muslim untuk berkarir tidak tidak boleh terbatas ataupun terfokus hanya pada kelompok ini, karena tidak hanya mereka yang mengalami hambatan berkarir. Pada dasarnya hampir semua perempuan Indonesia dan didunia mengalami hal tersebut. Tentu saja perhatian mereeka yang berkepentingan akan cenderung pada suatu yang menarik atau bermanfaat bagi mereka, tetapi kalau kita berbicara tentang konsep *pruralisme* dan masyarakat sipil maka konteknya menjadi lebih luas dari pada sekedar agama dan gender. Saya pikir kita semua setuju tentang hal ini.

Persoalannya sekarang barang kali adalah apa sesungguhnya yang dihadapi oleh sekelompok minoritas tersebut dan apa yang telah dilakukan bagi mereka yang menghadapi masalah diskriminasi dalam berbagai lini kehidupan, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya? Berbicara tentang apa yang terjadi, banyak sekali cerita yang bisa dikemukakan diawal, saya merasa kurang berwenang untuk berbicara tentang hal ini. Yang bersangkutan harus menyuarakan sendiri masalah mereka masing-masing, karena pada dasanya persoalan diskriminasi adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa diwakili oleh orang lain.

Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang telah dilakukan bagi mereka yang telah dihadapi masalah diskriminasi itu, dan dalam ini kita perlu membahasnya daru berbagai level tampaknya hal ini telah tercermin dalam topik-topik bahasan seminar. Hanya saja, apakah kita bisa menjawab pertanyaan diatas secara gamblang untuk kontek Indonesia? Setahu saya, kita diIndonesia saat ini baru bisa berbicara padda tatanan ide dan bukan tataran praktis, karena banyak dan apa bisa dibandingkan dari kasus di inggris tidak bisa ditemukan di Indonesia.

Menurut Rais (2002;55) membatasi "hubungan kekuasaan adalah hubungan tidak setara yang ada diantara para *stake holders* karena adanya perbedaan kelas latar belakang pendidikan, maupun status sosial–ekonomi yang diakibatkan oleh perbedaan akses kesumber-sumber ekonomi maupun oleh adanya jumlah hubungan asimetris antar etnis dan antar agama dimasa lalu".

Menurut Bachtiar mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan di kelompokan dalam tiga kelompok besar, yaitu :

1. Ilmu-ilmu Alamiah (*Natural Science*), bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat di alam semesta. Kajian menggunakan metode

ilmiah, dapat 100% benar dan 100% salah. contoh: Biologi

2. Ilmu-ilmu sosial (*Social Science*), bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. kajian menggunakan metode ilmiah, hasilnya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran. contoh: Sosiologi
3. Pengetahuan Kebudayaan (*The Humanities*), bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian di beri arti. pengetahuan budaya *(the humanities)* dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian (disiplin) seni dan filsafat.

Menurut Martin (1994:331), masalah timbul jika ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Masalah adalah suatu situasi dimana ada sesuatu yang diinginkan tetapi belum diketahui mendapatkannya. (Stepelmen, 202:96)

Ruseffendi (1991:169) mengemukakan bahwa sesuatu merupakan masalah bagi seseorang apabila sesuatu itu baru dan sesuai dengan kondisi yang memecahkan masalah, dan kondisi yang memecahkan masalah memiliki pengetahuan prasyarat. Persoalan menjadi masalah bagi seseorang apabila orang tersebut:

1. mampu menyelesaikan tetapi tidak menggunakan cara atau algoritma yang rutin,
2. mempunyai kesiapan untuk menyelesaikan (mental, pengetahuan),
3. ada niat untuk menyelesaikan (Ruseffendi, 1991: 336)

D. Desa Swadaya dan Desa Swasembada.

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

E. Definisi & Ciri Daerah Slum / Daerah Kumuh - Area, Wilayah, Lingkungan Kota

Ruseffendi (1991:213) membatasi bahwa "slums adalah daerah yang sifatnya kumuh tidak beraturan yang terdapat di kota atau perkotaan". Daerah slum umumnya dihuni oleh orang-orang yang memiliki penghasilan sangat rendah, terbelakang, pendidikan rendah, jorok, dan lain sebagainya. Di jakarta dan sekitarnya banyak terdapat daerah slum baik di tengah maupun pinggiran kota. Berikut ini adalah ciri-ciri daerah slum :

1. Banyak dihuni oleh pengangguran
2. Tingkat kejahatan / kriminalitas tinggi
3. Demoralisasi tinggi
4. Emosi warga tidak stabil
5. Miskin dan berpenghasilan rendah
6. Daya beli rendah
7. Kotor, jorok, tidak sehat dan tidak beraturan
8. Warganya adalah migran urbanisasi yang migrasi dari desa ke kota
9. Fasilitas publik sangat tidak memadai
10. Warga slum yang bekerja kebanyakan adalah pekerja kasar dan serabutan
11. Bangunan rumah kebanyakan gubuk / gubug dan rumah semi permanen.

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan bebera pendekatan penelitian yakni studi literatur dan pengambilan kesimpulan.

1. Studi literatur
   Studi literatur dilakukan membaca buku literatur tentang antropologi budaya . Selain itu juga melakukan pencarian data di internet tentang, gejolak politik horisontal serta permasalahan kejadian dimasyarakat melalui penelusuran dengan data kualitataif diprovinsi Banten pada umumnya di kabupaten serang,pandeglang,lebak, serta tangerang, tangerang kota dan tangerang selatan dan kerja sama dengan dinas kesbag linmas
2. Metode teoritis *sampling*
   Proses pengumpulan data guna merumuskan teori dimana seorang analis secara bersama-sama sekaligus mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data serta menentukan data mana yang perlu dikumpulkan dimana harus mencari data-data itu, untuk bisa mengembangkan teorinya.
   Proses pengumpulan data ini dikontrol oleh yang timbul saat itu apakah yang *subtantif* ataupun yang *formal*. Penentuan awal dalam pengumpulan data yang teoritis ini didasarkan hanya pada *perspektif sosiologis* umum serta pada masalah yang umum.
3. Pengambilan kesimpulan
   Setelah proses analisa telah selesai dilakukan, maka dilakukan pengambil kesimulan dari analisa data literatur dilakukan sebelumnya

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2010, BPS menemukan 19,93 juta orang miskin yang tinggal di desa. Dengan menggunakan asumsi Kementerian Pertanian bahwa 70% orang miskin desa adalah petani, maka artinya ada 13,95 juta petani yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka ini untuk kesekian kalinya mengukuhkan petani sebagai koloni miskin terbesar yang hidup di Indonesia.

A. Kemiskinan Petani

Sketsa kemiskinan koloni petani dapat tergambarkan melalui alat lukis *vicious circle of poverty* atau lingkaran kemiskinan. Menurut catatan Kompas edisi 21 Mei 2002, sebuah rumah tangga tani yang memiliki lahan seluas 0,5 hektar hanya memiliki keuntungan sebesar Rp. 135.000 perbulannya. Pendapat sebesar ini akan habis untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Petani tidak dapat melakukan investasi dan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut data yang dimiliki Serikat Petani Indonesia (SPI), tahun 2006 saja dijumpai 88% petani yang masih memiliki lahan pertanian seluas 0,5 hektar. Pun demikian, BPS tahun 2004 menginformasikan bahwa 76,6% petani adalah tidak berpendidikan dan tamatan SD. Dengan lahan yang tetap sempit dan mutu pendidikan yang tetap rendah, pendapatan petani akan tetap kecil. Dan seterusnya, petani hidup dalam lingkaran kemiskinan itu.

B. Pemiskinan Petani

Petani menjadi koloni miskin terbesar adalah karena mereka dimiskinkan pemerintah. Pemiskinan itu terjadi pada tiga tahap, yaitu sebelum masa tanam, saat masa tanam, dan setelah masa tanam. Pada sebelum masa tanam, kebijakan pertanahan pemerintah bias dan tidak memihak petani. Pemerintah lebih memilih memberikan puluhan hektar tanah kepada agro-industri guna ditanami tanaman ekspor (kelapa sawit, karet, dsb). Sedangkan petani hanya mendapatkan remah, yaitu 0,5 hektar per rumah tangga. Keuntungan yang didapat dari tanah seluas ini tidak mungkin dan akan pernah mungkin bisa menyejahterakan petani.

Pada masa tanam, kebijakan subsidi pemerintah terhadap bibit-pupuk tidak menguntungkan petani. Dana yang diperuntukkan bagi subsidi keduanya pada tahun 2011 ini menyusut dibanding dengan APBN-P 2010. Pada APBN-P 2010, bibit-pupuk mendapat subsidi masing-masing sebesar Rp.18,3 dan Rp.2,3 triliun. Namun, tahun ini kedua komoditas tersebut hanya mendapatkan subsidi masing-masing sebesar Rp. 16,4 triliun dan Rp. 100 miliar. Artinya, ongkos produksi yang harus ditanggung petani kian meningkat.

Pada saat panen, kebijakan impor beras sudah menanti. Alasannya adalah karena persediaan beras di gudang BULOG menipis. Hal ini lalu ditafsirkan pemerintah bahwa petani mengalami gagal panen. Padahal, menipisnya persediaan beras di gudang BULOG disebabkan oleh daya serap BULOG itu sendiri yang rendah. Sebab, menurut catatan akhir tahun milik SPI, panen padi selama tahun 2010 meningkat

menjadi 65.980.670 ton dari tahun sebelumnya sebesar 64.398.890 ton. Namun apa boleh buat, pemerintah tetap akan membanjiri pasar nasional dengan beras impor yang harganya lebih murah dibanding beras lokal. Petani kehilangan konsumen. Pendapatan semakin kerdil.

Di sisi lain, realita juga menyuguhkan aksi-aksi para politisi, akademisi, dan penggiat LSM dalam memperjuangkan kesejahteraan petani. Beragam organisasi tani kemudian dibentuk. Dengannya, mereka lalu melakukan perjuangan dengan cara yang sesuai dengan sistem 'baku' pemerintah, misalnya aksi, berdebat dilegislatif, dan menggugat beberapa UU *neolib* ke MK.

Sungguh petani merasa beruntung mendapati dukungan dari berbagai kalangan dalam mengejar mimpi kesejahteraannya. Namun, kita dan petani itu sendiri tentunya pasti bertanya-tanya di dalam hati, apa gerangan yang sebenarnya terjadi, karena sudah bertahun-tahun berjuang namun mimpi kesejahteraan tak kunjung menjadi kenyataan?

C. Subjektifikasi Petani

Bagi penulis, jawaban atas rasa keingintahuan di atas adalah mudah, yaitu karena selama ini petani tidak ditempatkan dalam posisi ideal sebagai subjek/pelaku, melainkan sebagai objek dalam gerakan pengentasan kemiskinan dirinya sendiri. Kekeliruan ini lalu menciptakan tiga kekeliruan turunan, yaitu terkooptasinya gerakan petani oleh kepentingan politik, terpecahnya gerakan perjuangan, dan tersanderanya petani dalam perjuangan yang sesuai dengan sistem 'baku' pemerintah.

Saat ini, dapat dijumpai beberapa organisasi tani yang diketuai oleh para politisi 'pemilik' parpol tertentu. Jika meminjam teori elit milik Laswell dan Kaplan, maka dengan mudah didapati kesimpulan bahwa kekuasaan yang dmiliki oleh sang politisi ini digunakan untuk mengarahkan perliaku petani agar mendukung parpol yang dipimpinnya. Kesimpulan ini terkonfirmasi mana kala melihat hasil pemilu dua tahun lalu. Daerah lumbung petani seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, parpol yang memiliki pimpinan yang merangkap ketua ormas tani tertentu menang besar. Artinya, semua sarat dengan dengan tujuan pemenuhan kepentingan politik. Tiada kesungguhan perjuangan nasib petani.

D. Penentuan Objek dan Tujuan Dalam Prospek Kemajemukan Umat

Bagi kalangan yang sangat optimis terhadap globalisasi, seperti Thomas L. Friedman dan beberapa tokoh lainnya, globalisasi adalah satu-satunya jalan yang dapat digunakan manusia untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Runtuhnya berbagai sistem ekonomi yang menjadi rival kapitalisme, telah meyakinkan sebagian kelompok ini bahwa globalisasi dan liberalisasi pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih baik, dan efisiensi ekonomi, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh *sosialisme* maupun *komunisme?* Kecenderungan-kecenderungan globalisasi dalam bidang ekonomi juga terlihat dari munculnya`perusahaan-perusahaan multinasional`dan`transnasional.

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh masyarekat di seluruh dunia melalui penjualan saham dan bursa efek. Kegiatan operasional perusahaannya pun tersebar di berbagai kawasan krakatau real estate dan industri chemical,kontruksi alat berat . Hal Yang sama juga dilakukan oleh perusahaan perusahaan besar lainnya, seperti. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai banyak cabang di luar negeri, mereka mempunyai sumber dana, teknologi, dan kemampuan melobi yang hampir tiada bandingnya.

Keberadaan perusahaan *multinasional* dan transnasional tersebut beserta investasi yang mereka bawa menjadi harapan banyak negara, baik miskin maupun kaya. Investasi yang mereka tanamkan sangat diharapkan untuk melakukan pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja nyatanya pengangguran struktural di kalangan lokal, dan dengan demikian meningkatkan taraf hidup masyarakat umumnya masyarakat /hijrah (imigran).

V. KESIMPULAN

Pola hidup dan budaya khususnya di kalangan para petani di era global ini masih banyak diwarnai dengan konflik dan intrik-intrik tertentu, namun demikian konflik bukanlah dihindari apalagi untuk di abaikan, akan tetapi konflik hendaklah harus dihadapi atau di kompromikan kepada pihak yang bertingkai. Konflik dapat diatas jika

komunikasi diantara para pihak yang terjadi konflik dapat dipahami dan dicari solusinya.

Pihak Pemerintah yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan memberikan manajemen konflik yang baik sebagai moderator terhadap 2 kubu yang mengalami konflik. Ketegasan pemerintah sangat dinantikan dalam mengatasi konflik yang ada di negara kita. Kasus Cikeusik kabupaten Pandeglang adalah konflik *horizontal* yang sebenarnya peran pemerintah sangat penting untuk bertindak dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kesempatan untuk berkompromi kepada kedua belah pihak sehingga tidak terjadi konflik lagi.

Kita berharap ketegasan pemerintah dalam masalah konflik di Negara ini haruslah jelas, disini Pemerintah adalah moderator bagi pihak yang bertikai. Jika ada yang melanggar hukum maka Hukum yang berlaku harus menindak pihak-pihak yang bermasalah.

bahwa sumber konflik terjadi dikarenakan:

1. Tercipta perubahan nilai yang sangat cepat di dalam organisasi atau masyarakat yang menimbulkan pertentangan.
2. kurangnya komunikasi di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya konflik antar golongan.
3. Muncul kepentingan baik kepentingan golongan maupun individu yang menguntungkan pihak bersengketa untuk diperjuangkan.

Dari ketiga point itu diperlukan manajemen konflik yang digunakan untuk mengatasi konflik atau pertentangan di tengah masyarakat atau golongan sehingga tidak menganggu situasi dan kondisi suatu masyarakat atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan, kerusuhan, tindakan negatif yang dapat merugikan golongan atau individu tersebut.

Warga Banten berusaha bertahan di debur arus global terhadap pelestarian budayanya akan tetapi waktu setiap putaranya tidak pernah kembali. Warga negara yang maju benar-benar harus teruji pada sumber daya manusia (SDM) dari segi pendidikannya maupun latar belakang kulturnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak dengan gigih mereka harus hijrah mencari rizki untuk sandang pangan dan papan pada umumnya.

Mudah-mudahan Banten umumnya kedepan warganya mengenal akan teknologi dan tidak lagi menggunakan keahlian tradisionalnya dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran pendahulunya dan selalu memegang prinsip-prinsip pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ambary, Hasan Muarif. 1990. *The sultane of Banten*. Jakarta: Penerbit Gramedia

Baker, A. 1992. *Ontologi: Metafisika Umum.* Kanisius. Yogyakarta.

Geerzt, H. 1980. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonsia.* Yis dan FIS UI. Jakarta.

Gibson, Ivancevich, Donnely. 1996. *Organization, Behavior, Structur, and Process*, 5th edition

Hainsworth, Geoffrey dalam Bakti Setiawan. 2007. Drama Indonesia: Ketidakpastian Dalam Dunia yang Mengglobal. Yogyakarta: Gajah Mada

Mardanas,Izarwisma. 1991. Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Sumatra Barat. Jurnal Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya

Kuntowijoyo. 1990. *Metodologi Sejarah.* Tiara Wacana. Yogakarta.

Khariri. 2008. Islam Dan Budaya Masyarakat. Jakarta: Fajar Pustaka

Rais, Amien. 2002 . *Living Together In Prulars Societies.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar

Liddle, Rwiliam. 2007. Islam Politik Dan Modernisasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Ridwan. 2006. Kekerasan Berbasis Gender. Jakarta: Fajar Pustaka

Salam, Burhanuddin. 1988. *Filsafat Manusia (Antropologi Metafisika).* Jakarta: Bina Aksara.

Schuon, F. 1997. *Hakikat Manusia.* Yogakarta: Pustaka Pelajar

Setiadi, Elly M.dkk. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soejono. 1983. *Struktur Masyarakat.* Jakarta: Rajawali.

Suleman, munandar. 1995. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Eresco